

KONSEP SISTEM PEMBIAYAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN DALAM LINGKUP PENDIDIKAN

Nuraini

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

E-mail: nuraini@gmail.com

Abstract: *Financial problems are a pretty basic problem in school. Because all the components of education in school are closely related to the financial component of the school. Although not entirely, financial problems will directly affect the quality of schools, especially with regard to facilities, infrastructure and learning resources. Many schools are not able to do teaching and learning activities optimally, just because of financial problems. Both to teach teachers and even for school operational activities are in dire need of funds are not small. Thus, by knowing the concept of financing system as well as financial management and financial administration is very necessary to be known by practitioners of financial management at school institutions.*

Keywords: *Concept of Financing System, Financial Administration*

Sistem Pembiayaan

Setiap kebutuhan organisasi, baik personel maupun material semua memerlukan adanya biaya. Itulah sebabnya maka masalah pembiayaan kini harus sudah dimulai dipikirkan sejak pembuatan perencanaan sampai dengan pelaksanaan (Eka Prihatin, 2011: 15). Biaya pendidikan akan ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan meliputi pengadaan sarana dan prasarana dan biaya satuan. Menurut pendekatan sistem biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran, penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu lembaga pendidikan yang akan mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik kegiatan tersebut disebut efisien dan efektif. Pendekatan mutu analisis dan alokasi biaya yang memfokuskan pada peningkatan mutu proses belajar mengajar, walaupun hal ini membatasi jumlah pelajar.

Menurut analisis Nanang Fattah (2000: 79) dalam Moch. Idochi Anwar Investasi pendidikan sebagai kegiatan inti pengembangan sumber daya manusia terbukti telah memiliki sumbangan yang sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi. Berdasarkan temuan studi tersebut bahwa keuntungan ekonomi (*rate of return*) investasi pendidikan ternyata lebih tinggi dari pada investasi fisik dengan membandingkan rata-rata 15,3% dan 9,1% ini berarti investasi pendidikan bagi suatu bangsa atau daerah merupakan upaya yang menguntungkan baik secara sosial maupun secara ekonomis. Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan biaya dalam lingkup lembaga pendidikan asumsi yang aman dalam menentukan biaya pendidikan secara kasar membagi biaya pendidikan dalam tiga bagian, yaitu: (1) yang berhubungan dengan guru

(personal pendidikan), (2) yang berhubungan dengan murid dan (3) yang berhubungan dengan bangunan, kemudian menentukan kebutuhan biaya untuk unit masing-masing (Moch.Idochi Anwar, 2013: 212). Dalam keadaan yang tidak banyak berubah, suatu unit gabungan dari ketiga unsur ini dapat digunakan, tetapi kebanyakan perencanaan pendidikan tidak berada dalam keadaan yang tetap. Kondisi yang juga sering berubah-ubah setiap saat, selain gaji guru yang perlu diperhatikan, juga luas bangunan dan mebel di dalamnya sangat terkait dengan beberapa besarnya bangunan dan jumlah peralatan yang tersedia.

Pengambil kebijakan pendidikan dilembaga pendidikan berkaitan dengan potensi sumber-sumber dana, khususnya legislative dan pemerintah daerah bersama para pemimpin pendidikan setelah mendapat pelimpahan wewenang perlu merumuskan secara spesifik sumber dana pendidikan mereka harus mampu dalam waktu yang relative singkat untuk menghitung biaya yang diperlukan dan dari mana sumber biaya itu didapat diperoleh dengan menghitung secara rinci dan detail yang dialokasikan bagi keperluan pendidikan. Perhitungan itu penting sekali, artinya untuk memperoleh kualitas SDM yang diperlukan karena kualitas SDM ini akan menjadi daya dukung utama menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan dalam lembaga pendidikan. Potensi sumber daya pendidikan untuk pembangunan bangsa yang berbudaya. Dalam mengefektifkan biaya pendidikan ada tiga strategi yang harus dilaksanakan:

1. Strategi Penganggaran (*Budgeting Strategy*)

Budgeting merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dalam kurun waktu tertentu. *Budgeting* menjadi dokumen yang meringkaskan keputusan yang direncanakan, dan dapat bertindak sebagai alat untuk memastikan penggunaan dana masyarakat secara jujur dan hati-hati. Menurut Komaruddin (1979) mengemukakan: “*Budgeting* sebagai perencanaan dan koordinasi dari berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu periode tertentu dengan melakukan prakiraan kebutuhan yang diperlukan dan hasil yang ingin dicapai serta pelaksanaannya. *Budgeting* merupakan alat perencanaan juga sebagai alat pengendali”.

Budgeting merupakan alat penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk biaya untuk setiap komponen kegiatan. (1) menyusun ramalan tentang kemungkinan pendapatan belanja selama periode tertentu; (2) menetapkan anggaran berdasarkan ramalan; (3) statistik pelaksanaan dikumpulkan dan dibandingkan dengan dugaan-dugaan; (4) mengukur varia-varian dan menganalisis penyebab-penyebabnya; dan (5) melakukan perbaikan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat anggaran adalah: (1) permintaan terhadap hasil produksi dan stabilitas permintaan potensi dasar; (2) jenis-jenis hasil produksi yang dibuat; (4) kemampuan menyusun jadwal dan mengatur pelaksanaan; (5) jumlah dana yang diperkenankan dibandingkan dengan hasil yang mungkin dicapai; dan (6) perencanaan dan pengawasan.”

2. Proses Penganggaran (*Budget proses*)

Proses penganggaran dapat meliputi hal yang sederhana yang bersifat informal pada lembaga kecil yang hanya membutuhkan beberapa hari sampai dengan proses yang sangat rumit dan panjang pada perusahaan atau institusi besar seperti dalam suatu pemerintahan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari satu tahun. Proses penganggaran biasanya meliputi: (1) komite anggaran yaitu berfungsi untuk mengawasi anggaran secara keseluruhan yang beranggotakan untuk

mengawasi anggaran secara keseluruhan yang beranggotakan unsur pimpinan pada suatu institusi, komite anggaran merupakan otoritas tertinggi dalam organisasi untuk segala hal yang berkaitan dengan anggaran; (2) penentuan periode anggaran, yaitu disusun untuk periode satu tahun sejalan dengan tahun fiskal organisasi; (3) spesifikasi pedoman anggaran, yaitu untuk menentukan pedoman anggaran dan itu merupakan tanggung jawab komite anggaran; (4) penyusunan anggaran didasarkan atas pedoman anggaran serta arah anggaran yang dikaitkan dengan faktor eksternal dan internal lembaga; (5) negosiasi anggaran ini dilakukan antara setiap unit dengan atasannya, jika ada perubahan dalam usulan anggaran, maka dilakukan negosiasi pada semua level organisasi dan umumnya menyita sebagian besar waktu penyusunan anggaran; (6) review, di mana komite anggaran memeriksa anggaran yang berkaitan dengan konsistensi dengan pedoman anggaran, pencapaian tujuan jangka pendek dan pemenuhan terhadap rencana strategic, pimpinan memberikan persetujuan anggaran secara keseluruhan dan mengajukan anggaran secara keseluruhan dan mengajukan anggaran tersebut kepada dewan redaksi atau kepala daerah pada pemerintah; (7) revisi anggaran dilakukan hanya keadaan khusus, persetujuan untuk memodifikasi anggaran sulit dilaksanakan, walaupun sebenarnya hal itu dapat terjadi, sebab tidak semua peristiwa dapat diperkirakan ke dalam anggaran (Moch. Idochi Anwar, 2013: 215).

3. Anggaran Induk (*Master Budget*)

Anggaran induk (*Master Budget*) merupakan dokumen yang menjadi sandaran bagi organisasi dalam mencapai tujuan strategic dan rencana jangka panjang untuk periode yang akan datang. Suatu organisasi menyusun pedoman anggarannya untuk periode yang akan datang berdasarkan tujuan strategic dan rencana jangka panjang tujuan organisasi tersebut. Anggaran induk untuk satu periode disusun mengikuti pedoman anggaran, dan anggaran induk ini merupakan anggaran operasi organisasi (Moch. Idochi Anwar, 2013: 216).

Administrasi Keuangan Di Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan seperti sekolah merupakan kerangka kelembagaan dimana administrasi pendidikan dapat berperan dalam mengelola organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jam'an Satori dalam bukunya (Eka Prihatin, 2011: 6) Administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan dapat dilihat dalam tiga tingkatan yaitu tingkat institusi, tingkat manajerial, dan tingkat teknis. Tingkat institusi berkaitan dengan hubungan antara lembaga pendidikan (sekolah) dengan lingkungan eksternal, tingkat manajerial berkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi lembaga (sekolah), dan tingkat teknis berkaitan dengan proses pembelajaran, dengan demikian manajerial pendidikan dalam konteks kelembagaan pendidikan mempunyai cakupan yang luas, disamping itu bidang-bidang yang harus ditanganinya juga cukup banyak dan kompleks dari mulai sumberdaya fisik, keuangan dan manusia yang terlibat dalam proses kegiatan pendidikan di sekolah (Eka Prihatin, 2011: 7).

Bentuk modal yang perlu dikelola untuk keberhasilan pendidikan ada lima (Murphy dan Louis, ed 1999: 515 dalam Eka Prihatin) *Integrative capital, Human capital, financial capital, social capital, dan political capital*. Modal *integrative* adalah modal yang berkaitan dengan pengintegrasian empat modal lainnya untuk dapat

dimanfaatkan bagi pencapaian program atau tujuan pendidikan, *modal manusia* adalah sumber daya manusia kemampuan untuk menggunakan pengetahuan bagi kepentingan proses pendidikan atau pembelajaran, *modal keuangan* adalah dana yang diperlukan untuk menjalankan dan memperbaiki proses pendidikan, *modal sosial* adalah ikatan kepercayaan dan kebiasaan yang menggambarkan sekolah sebagai komunitas, dan *modal politik* adalah dasar otoritas legal yang dimiliki untuk melakukan proses pendidikan dan pembelajaran (Eka prihatin 2011: 8).

Administrasi keuangan masuk dalam *scope* (bidang garapan) administrasi tata laksana sekolah yang meliputi bagian sebagai berikut: a) organisasi dan struktur pegawai tata usaha, b) otorisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, c) masalah kepegawaian dan kesejahteraan personel sekolah, d) masalah perlengkapan dan perbekalan, e) keuangan dan pembukuannya, f) korespondensi, g) laporan-laporan, h) masalah pengangkatan dan pemindahan, penempatan dan pemberhentian pegawai, i) pengisian buku pokok, klapper, rapor dan sebagainya. Dalam administrasi keuangan di sekolah kegiatan yang perlu dilakukan adalah perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, dan evaluasi dan tanggung jawab.

1. Perencanaan Pembiayaan

Perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan, yaitu menyusun anggaran, dan pengembangan rencana anggaran belanja biasa di singkat dengan RAPBS/RAPBM (Madrasah). 1) Penyusunan anggaran pembiayaan pendidikan atau sering disebut anggaran belanja sekolah/madrasah biasanya dikembangkan dalam format-format yang meliputi sumber pendapatan dan pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan. Ada empat fase kegiatan pokok dalam penyusunan anggaran a) Perencanaan anggaran, merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternative pencapaian tujuan dengan analisis cost-effectiveness, membuat rekomendasi alternative pendekatan untuk mencapai sasaran. b) Mempersiapkan anggaran antara lain menyusun kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisir kelengkapan peralatan, dan bahan-bahan yang telah tersedia. c) Mengelola pelaksanaan anggaran antara lain mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan, dan membuat transaksi, membuat perhitungan, pengawasan pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan. d) Menilai pelaksanaan anggaran antara lain menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang (Depag, 2005: 82).

Perencanaan pembiayaan pendidikan memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Beberapa factor yang turut mempengaruhi perencanaan pembiayaan pendidikan antara lain: laju pertumbuhan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan serta peningkatan pendekatan pembelajaran. Memperhatikan pendapat Morphet dalam (Depag RI, 2005: 83) dapat diidentifikasi beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan sebagai berikut: anggaran belanja

harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan, merevisi peraturan dan input lain yang relevan dengan merancang pengembangan system secara efektif, memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus dan berkeseimbangan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti: sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan luas tentang dinamika social masyarakat, tersedia informasi yang akurat dan tepat waktu untuk menunjang pembuatan keputusan, menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan, dan tersedianya dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan (Depag RI, 2005: 83).

2) Pengembangan rencana anggaran belanja langkah-langkahnya sebagai berikut: a) pada tingkat kelompok kerja kepala sekolah dan pembantu kepala serta berbagai elemen yang ada di lembaga sekolah melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan, selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kelompok kerja selanjutnya dilakukan alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia. b) pada tingkat kerja sama dengan komite sekolah perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam rangka mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBS. c) sosialisasi dan legalitas, selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi dan legalitas kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBS kepada dinas terkait untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan (Depag RI, 2005: 84).

2. Pelaksanaan Pembiayaan

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.

a. Penerimaan

Penerimaan pembiayaan pendidikan dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati. Secara konseptual banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan, namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan ada beberapa karakteristik yang identik. Berdasarkan buku pedoman rencana, program dan penganggaran, sumber dana pendidikan yang dapat dikembangkan dalam anggaran belanja yaitu anggaran rutin dan penunjang pendidikan. Prosedur pembukuan penerimaan pembiayaan pendidikan menganut pola paduan antara peraturan pemerintah dan lembaga sekolah kalau madrasah dibawah Kemenag dan sekolah dibawah naungan kemendikbud. Dalam hal ini ada beberapa anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang intinya pihak madrasah/ sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan atau pengeluaran, dan madrasah/sekolah hanya sebagai pelaksana pengguna dalam tingkat makro kelembagaan. Dengan demikian pola manajemen pembiayaan pendidikan terbatas pada pengelolaan dana tingkat operasional. Salah satu kebijakan

pembiayaan pendidikan berbasis madrasah atau sekolah adalah adanya pencarian dipadukan sesuai tatanan yang lazim sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan semangat otonomi dan desentralisasi pendidikan dengan pengembangan konsep manajemen berbasis madrasah atau sekolah, maka madrasah atau sekolah memiliki kewenangan dan keluasaan yang cukup lebar dalam kaitannya dengan manajemen pembiayaan dan administrasi keuangan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan.

b. Pengeluaran

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan secara efektif dan efisien. Artinya, setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan. Pengeluaran yang sering dilakukan oleh lembaga sekolah atau madrasah seperti pendidik, tenaga kependidikan, bahan-bahan, perlengkapan, dan fasilitas. Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggung jawaban pembukuan, meliputi format buku kas harian, buku tabularis, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya.

Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan pembiayaan pendidikan maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Kepala sekolah dan madrasah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi administratif. Kemampuan untuk menerjemahkan program pendidikan kedalam ekuivalensi keuangan merupakan hal penting dalam penyusunan anggaran belanja. Kegiatan membuat anggaran belanja bukan pekerjaan rumit atau mekanis, melibatkan pertimbangan tentang maksud dasar dari pendidikan dan program. Berdasarkan perspektif tersebut perencanaan pembiayaan pendidikan harus dapat membuka jalan bagi pengembangan dan penjelasan konsep-konsep tentang tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan merancang cara-cara pencapaiannya (Depag RI, 2005: 86).

3. Evaluasi dan Tanggung jawab

Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini juga disebut evaluasi. Auditing merupakan pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang dilaksanakan, sedangkan apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas, proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembiayaan atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak. Evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dapat diidentifikasi kedalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana pendidikan tingkat sekolah atau madrasah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah atau madrasah.

a. Evaluasi

Evaluasi pembiayaan pendidikan, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kewenangan, karena kebutuhan merupakan bagian dari pengawasan

melekat. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan kepala sekolah atau madrasah perlu melakukan pengendalian pengeluaran keuangan selaras dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Artinya sebagai pimpinan bertanggung jawab terhadap masalah internal sebagai atasan (Depag RI, 2005: 87).

Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal ini dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditandatangani sebagai berita acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggungjawab penuh atas pengendalian, sedangkan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertikal, seperti petugas dari Dinas Pendidikan, dan Bawasda kalau madrasah Kepala Kanwil Departemen agama dan kantor Departemen Agama. Pengawasan tersebut relative dilihat dari tugas rutinitas atas dasar kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di sekolah.

Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya sangat normative administrative. Artinya pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistik penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering terjadi di setiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya fungsi administrasi keuangan dimana aliran uang, dan teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi (E. Mulyasa, 2005: 206-207).

b. Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban penerimaan dan penggunaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah atau sekolah dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada kepala Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kemenag setempat. Khusus untuk keuangan komite madrasah atau sekolah, bentuk pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.

c. Keterlibatan pengawas pihak eksternal

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, pengawasan keuangan pihak eksternal madrasah dilaksanakan oleh petugas Bawasda, dan Kementerian Agama, baik dana yang bersumber dari pemerintah maupun dana dari masyarakat (orang tua peserta didik). Pengawasan manajemen pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Bawasda tersebut dilakukan secara rutin satu tahun sekali melalui pemeriksaan pembukuan keuangan Madrasah atau sekolah (Depag RI, 2005: 88).

4. Model-model Pembiayaan Pendidikan

Penyaluran biaya pendidikan yang menjadi tanggungjawab Negara tentu memerlukan model pembiayaan, agar model biaya tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menyelenggarakan program pendidikan. Adapun model pembiayaan tersebut perlu dicermati sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Model Flat Grant

Jones dan Morphet (1975: 253) dalam Moch. Idris Anwar (2013: 231) model ini dana bantuan dari Negara dialokasikan ke sekolah dari daerah-

daerah tanpa memperhitungkan berbagai pertimbangan kemampuan membayar pajak antar daerah itu untuk keperluan pendidikan di sekolah-sekolah. Suatu jumlah yang seragam bagi setiap siswa dan guru atau beberapa unit lain yang perlu diberikan tanpa memperhitungkan berbagai pertimbangan yang penting dalam tiap-tiap pembayaran terhadap perbedaan pelayanan program pendidikan, dan berubah-ubahnya adalah jumlah yang berjumlah pada setiap bagian menggambarkan perlunya perbedaan-perbedaan di dalam tiap-tiap pembayaran yang dibagikan pada sekolah di daerah-daerah setempat. Sistem ini tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan para siswa seperti pada siswa-siswa yang pintar atau sebaliknya, atau siswa yang berkemampuan dua bahasa, karena lebih mahal untuk mendidiknya dari pada siswa yang berbahasa inggris sebagai bahasa aslinya.

b. Model Landasan Perencanaan

Model landasar perencanaan merupakan pendekatan yang paling umum, dan tujuannya untuk menjamin pengeluaran tahunan minimal persiswa seluruh sekolah negeri di daerah, terlepas dari kekayaan yang didapat dikenakan pajak lokal.

c. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak

Anggaran pendidikan ditentukan oleh seberapa besar fajak yang akan digunakan untuk pendidikan. Model ini merupakan perencanaan jaminan pajak yang mempunyai filosofis ekonomi yang sama seperti perencanaan, persamaan kemampuan, dan kapasitas yang berhubungan dengan keuangan dan pengeluaran sebanyak mungkin, ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian persiswayang mana jaminan Negara diperuntukan bagi sekolah wilayah setempat.(Moch. Idochi Anwar, 2013: 237)

d. Model persamaan

Sumbangan Negara dialokasikan pada sekolah di daerah-daerah setempat dalam proporsi yang terbalik pada kemampuan bayar pajak setempat. Dengan kata lain lebih banyak sumbangan yang ada pada setiap murid, bagi guru atau bagian yang lain yang dibutuhkan dialokasikan ke daerah-daerah yang kurang makmur.

e. Model Persamaan Presentasi

Sumbangan-sumbangan Negara dibagikan pada sekolah daerah-daerah setempat dalam proporsi yang terbalik sesuai kemampuan pembayaran pajak setempat. Sumbangan lebih banyak disediakan untuk tiap pajak setempat.

f. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan

Model perencanaan persamaan kemampuan merupakan suatu rencana negara membayar sebagian kecil pengeluaran sekolah dalam perbandingan inversi untuk daerah yang makmur. Model ini menekankan pada pembelajaran namun tujuannya bukan menanyakan pembelajaran tapi kekuatan pembelajaran setiap pajak terhadap semua distrik.

g. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya

Model pendanaan Negara sepenuhnya menurut Jones dalam Moch. Idochi Anwar (2013: 240) dimana pendanaan sepenuhnya oleh negara, yaitu semua pendanaan sekolah akan dikumpulkan ditingkat Negara dan didistribusikan kesekolah distrik dengan dasar yang sama. Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminasi perbedaan local dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Kerangka acuan penting untuk menyokong

konsep pendanaan sepenuhnya dari pemerintah harus dipertimbangkan pertama adalah asas keadilan perlakuan terhadap siswa dan pembayaran pajak, pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki social, yaitu banyak anak secara keseluruhan pada masyarakat meninggalkan pendidikan yang penting dalam hidupnya pengangguran, dan masalah kesejahteraan bagi generasi penerusnya.

h. Model Sumber Pembiayaan

Menyediakan suatu proses penentuan bagaimanakah pembiayaan pendidikan yang memadai untuk didapatkannya level bantuan finansial yang mencerminkan kebutuhan dimana kondisi ekonomi masyarakatnya berbeda setiap daerah. Model ini tidak bersangkutan baik dengan pendapatan pajak maupun kekayaan di suatu daerah, akan tetapi dicoba untuk mengukur apakah biaya suatu penyelenggaraan pendidikan memadai berdasarkan ketiga factor yaitu: 1) keterangan banyak ragam banyak jumlah kuantitas biaya belanja daerah untuk menyelenggarakan pendidikan, dimana pilihan masyarakat local pada level distrik diperbolehkan memutuskan tambahan pilihan identifikasi ongkos dari factor kuantitas. 2) data statistic dianalisis untuk mendata factor biaya ditujukan untuk menghitung indeks biaya pendidikan, dimana jumlah biaya minimal daerah dikehendaki untuk membayar layanan pendidikan dan beraneka ragam barang dan jasa, biaya minimal ini mungkin berbeda distrik ke distrik.

i. Model Surat Bukti Penerimaan

Suatu cara persediaan dana yang diperoleh dari pajak tambahan untuk sekolah-sekolah bukan umum dalam bentuk aneka ragam rencana penerimaan. Ada dua prinsip model ini adalah 1) anak dari setiap keluarga adalah pusat kesatuan mendasar dalam menentukan bantuan anggaran pendidikan, 2) bantuan dapat digunakan dalamn sekolah-sekolah umum atau sekolah kejuruan.

j. Model Rencana Bobot Siswa

Model ini dimana siswa-siswa dipertimbangkan dalam proporsi sifat-sifat yang khususnya (contoh kejuruan atau siswa yang paling pandai dua bahasa) untuk menentukan biaya pengajaran per siswa. Contohnya sebuah Negara menyediakan 5.000 dolar untuk tiap siswa dalam sebuah program dasar, sedangkan sumbangan pemerintah per siswa hanya 1,3 kali lebih tinggi atau 6.500 dolar untuk siswa yang cacat. Alokasi anggaran ini menggambarkan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh mengalokasikan anggaran pendidikan dasar, pendidikan kejuruan dan bagi siswa yang cacat. Model ini menjelaskan bahwa setiap kategori pendidikan akan membutuhkan anggran sesuai karakteristik dan kompleksitas dari penyelenggaraan pendidikan tersebut, oleh karena itu tidak mungkin menyamaratakannya (Moch. Idochi Anwar, 2013:244).

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, (2005), *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam,
Herabuddin, (2009), *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia.

Idochi Anwar, Moch., (2013), *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyasa, (2005), *Menjadi Kepala Sekolah Professional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Prihatin, Eka, (2011), *Teori Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.